



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CICIK SRI SUKARSIH**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **140305**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.894.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di SAMPANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 110 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 305 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 260 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
8. Tanah Seluas 310 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **853.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. MOTOR, HONDA F1CO2N25LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



4. MOBIL, MITSUBISHI FE349 Tahun 2006, HASIL SENDIRI	Rp.	140.000.000
5. MOTOR, HONDA C1M02N42LO AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	12.000.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1,5 RS CVT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	150.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	180.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	187.316.868
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.114.316.868
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.114.316.868

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.